

Eksistensi Dokumentasi di Indonesia

Afina Khofiani Tazkia

Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Diponegoro

Jl.Prof.Sudarto No.13, Tembalang, Kec. Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah 50275

Email: Afina.tazkia@gmail.com

Di Indonesia, kerjasama antar perpustakaan dalam sistem jaringan berawal pada 1971. Saat itu disepakati dibangunnya 4 sistem jaringan untuk ilmu sosial, ilmu pengetahuan-teknologi, ilmu biologi-pertanian, dan ilmu kedokteran-kesehatan. Sejak saat itulah muncul berbagai jaringan kerjasama dalam berbagai bidang lainnya. Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIH Nasional) akhirnya dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 91 Tahun 1999. Selanjutnya keputusan itu diperbaharui dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012. Pemerintah RI sebenarnya telah memberikan perhatian besar pada bidang perpustakaan dan dokumentasi.

Pada 1961, terbit Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 1961, tentang *tugas-kewajiban dan lapangan pekerjaan dokumentasi dan perpustakaan dalam lingkungan pemerintah*. Dengan peraturan tersebut sudah dibedakan tugas perpustakaan dengan tugas dokumentasi.

Ilmu Dokumentasi di Indonesia tidak berkembang. Hal ini jauh berbeda dengan Ilmu Perpustakaan. Studi penulis atas perkembangan dokumentasi di Indonesia dari 1973 sampai kini, menemukan bahwa dokumentasi memang terlupakan. Keterlupaan akan dokumentasi tidak saja terjadi di Indonesia (nasional), namun juga di ranah internasional (*Sudarsono, hlm 85-102, 2016*). Memang ilmu perpustakaan sendiri kini dalam posisi di simpang jalan karena lebih populernya sebutan ilmu informasi.

Persepsi Tentang Dokumentasi

A. Persepsi, Visi, dan Ekspektasi Manajer

Umumnya, kalangan manajer memahami bahwa dokumentasi tidak hanya terbatas pada dokumentasi literatur. Hanya sebagian kecil saja yang menganggap dokumentasi adalah perpustakaan. Mereka masih berpikir secara sektoral dan belum ada pemahaman tunggal tentang dokumentasi. Para manajer itu mengatakan kesadaran tentang pentingnya dokumentasi belum ada karena belum pernah diberikan ilmu tentang dokumentasi dengan benar. Mereka menyadari bahwa kebanyakan belum memahami secara benar proses dan cara-cara dokumentasi yang sesuai dengan unit kerja mereka. Ditekankan bahwa dokumentasi yang dimaksud tidak hanya terbatas pada dokumentasi literatur. Umumnya, mereka menghadapi kendala dalam tenaga pelaksanaannya.

B. Persepsi Pustakawan

Persepsi atau pemahaman kata dokumentasi pernah juga sepintas dikumpulkan dari kalangan pustakawan. Mayoritas jawaban merujuk pada dokumentasi sebagai proses atau kegiatan. Secara lebih khusus, dokumentasi adalah proses merekam objek, baik berupa objek audio, objek video, maupun objek audio-visual. Kelompok kedua adalah mereka yang mengatakan dokumentasi sebagai hasil dari proses atau kegiatan dokumentasi. Selanjutnya, pihak yang mengatakan dokumentasi adalah kumpulan atau himpunan hasil proses atau kegiatan dokumentasi. Terakhir adalah pihak yang mengatakan dokumentasi sebagai lembaga atau unit kerja yang melakukan proses dokumentasi.

Konsep dokumentasi

A. Paul Otlet

Paul Otlet dalam bukunya *Trait de Documentation* (1934) mengemukakan “buku-buku dan informasi terletak di sebuah gedung yang besar, dengan jaringan telepon atau jaringan tanpa kabel sebagai bagian dari sarana untuk memasukkan pertanyaan dari pembaca, serta ada layar untuk menampilkan buku-buku dan informasi dari gedung lain..” **Konsep dari Otlet adalah sebuah versi**

microphotographic dari sebuah buku yang mana foto tersebut dapat diperbesar. Hal ini mirip dengan konsep e-book, dimana sebuah karya tulis bisa dibuat dalam 2 versi, yakni buku tercetak dan versi elektronik book (e-book).

B. Suzanne Briet

Suzanne Briet menerbitkan manifestonya tentang dokumentasi. Briet menyatakan bahwa binatang termasuk dokumen. Briet menyebut antelope (spesies baru yang dipelihara untuk keperluan taksonomi dan penelitian) adalah dokumen primer. Semua deskripsi serta data pengamatan yang dicatat adalah dokumen sekunder. Dengan ditambahkannya antelope sebagai dokumen, penulis dapat mengatakan bahwa dokumen dilihat secara fisiknya terdiri atas dua kelompok, yaitu dua dimensi mati, dan tiga dimensi mati atau hidup.

C. Frits Donker Duyvis

Dia menyebutkan tentang dimensi spiritual dokumen (*a spiritual dimension to documents*). Donker memaknai dokumen sebagai ekspresi pikiran manusia seperti pendapat Otlet. Donker menggunakan pendekatan tersebut mengikuti kerangka Anthroposophy (suatu gerakan spiritual berbasis paham bahwa ada dunia spiritual yang komprehensif pada pikiran yang murni dan hanya dapat diakses oleh tingkatan tertinggi mental knowledge).

D. Siyali Ramamrita Ranganathan

Ranganathan menyatakan dokumen dengan istilah "*microthought on a flat surface*". Ranganathan menolak memasukkan materi audiovisual, radio, dan komunikasi melalui televisi sebagai dokumen. Ranganathan yakin bahwa dokumen sinonim dengan hasil pikir yang terekam di kertas, yang dapat dipegang secara fisik, dan dapat dilestarikan sepanjang masa.

Kaitan Evolusi Pengetahuan dengan Perkembangan Konsep Dokumentasi

Ilmu pengetahuan pada dasarnya lahir dan berkembang sebagai konsekuensi dari usaha-usaha manusia baik untuk memahami realitas kehidupan dan alam semesta maupun untuk menyelesaikan permasalahan hidup yang dihadapi, serta mengembangkan dan melestarikan hasil yang sudah dicapai oleh manusia sebelumnya.

Perkembangan Ilmu Pengetahuan tidak lahir secara tiba-tiba tetapi melalui proses yang kita sebut revolusi. Ilmu Pengetahuan muncul dari pengetahuan sehari-hari dan pengujian yang cermat dari sebuah analisa. Munculnya Ilmu Pengetahuan berawal dari filsuf-filsuf Yunani kuno abad ke-6 SM. Dalam perkembangannya filsafat mengantarkan konfigurasi dimana cabang-cabang ilmu pengetahuan melepaskan diri dari filsafat, yang masing-masing secara mandiri berkembang menurut metodologinya sendiri-sendiri.

Dalam perkembangannya Ilmu Pengetahuan banyak menghasilkan temuan-temuan yang sangat bermanfaat bagi manusia. Temuan-temuan yang terdokumentasi dengan baik yang berupa catatan-catatan, hasil temuan, dan analisa para ilmuwan terdahulu, kemudian banyak dikembangkan oleh ilmuwan-ilmuwan digenerasi berikutnya hingga sekarang.

Tanpa adanya dokumentasi yang berupa catatan-catatan, bukti temuan, dan analisa para ilmuwan terdahulu, kita tidak akan bisa mengetahui bagaimana perkembangan Ilmu Pengetahuan dari waktu ke waktu.

Tonggak Dokumentasi di Indonesia

1950 Indonesia mulai menjadi anggota (national member) Inter-national Federation for Documentation (FID). Pada waktu itu diwakili oleh Organization for Scientific Research (OSR), suatu lembaga penelitian non-pemerintah.

1956 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1956, MIPI dibentuk dengan kewajiban pokok yang keempat, yaitu menyelenggarakan pendaftaran kepustakaan dan benda-benda lain yang berharga untuk ilmu pengetahuan, yang berada di Indonesia. Sejak saat itu keanggotaan nasional Indonesia di FID diwakili oleh MIPI

1956 Kalangan pustakawan, kearsipan, dan dokumentasi membentuk Perhimpunan Ahli Perpustakaan, Arsip, dan Dokumentasi Indonesia disingkat PAPADI.

1957 Ketua MIPI, Prof. Sarwono, dalam prasarannya pada Konferensi MIPI yang pertama, 7–9 Januari 1957 di Bandung, menyampaikan visi atau pandangan

tentang dokumentasi. Ketua MIPI menyebut titik berat usaha yang keenam adalah meletakkan dasar supaya Majelis menjadi salah satu pusat dokumentasi dan penerangan mengenai soal-soal bertalian dengan ilmu pengetahuan.

1959 MIPI membentuk Panitia Dokumentasi untuk menyiapkan pembangunan Pusat Dokumentasi Ilmiah Nasional (PDIN). Luwarsih, Pj. Kepala Bagian Dokumentasi MIPI, menjadi Sekretaris Panitia.

1961 Terbit Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 1961 tentang Tugas Kewajiban dan Lapangan Pekerjaan Dokumentasi Pustaka dan Perpustakaan di Lingkungan Pemerintah.

1962 PAPADI berubah nama menjadi Asosiasi Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Indonesia (APADI).

1965 Pusat Dokumentasi Ilmiah Nasional (PDIN) dibentuk dengan Surat Keputusan Menteri Research Nasional nomor 107/M/Kpts/Str/65 tanggal 1 Juni 1965. Menteri Riset Nasional pada waktu itu adalah Dr. Sudjono D. Pusponegoro.

1965 Bibliotheca Bogoriensis tercatat sebagai Associate Member FID.

1967 Untuk pertama kalinya Indonesia berpartisipasi dalam Konferensi ke-33 FID di Tokyo. Luwarsih mewakili sebagai national member dan Sahertian mewakili sebagai associate member. Sekembalinya ke Indonesia, Luwarsih melaporkan keikutsertaannya dalam konferensi dengan laporan berjudul “Federation Internationale de Documentation (FID) dan Konferensi Ke-33 di Tokyo”.

1983 Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah (PDII-LIPI menyelenggarakan Seventh FID/CAO General Assembly and Congress, Yogyakarta, Indonesia, 3–5 Maret 1983. FID/CAO singkatan dari *International Federation for Documentation, Commission for Asia and Oceania* yang dibentuk pada 1968.

1989 PDII-LIPI ditugaskan merintis Program Nasional Jaringan Informasi Keanekaragaman Hayati (*National Biodiversity Information Network*).

Penugasan ini menjadi awal pertanyaan tentang makna lain kata “dokumentasi” selain makna yang dianut kalangan perpustakaan di Indonesia.

1992 Muncul pendekatan Blasius Sudarsono untuk memahami kepustakawanan, yaitu pada awal mula adalah kehendak manusia untuk mengekspresikan apa yang dipikirkan dan atau yang dirasakannya.

1995 PDII-LIPI menyelenggarakan *Thirteenth FID/CAO Congress and Assembly* dengan tema “*The challenge of information system towards the 21st century: Strategic use of information systems in Asia and Pacific countries*”, di Jakarta, tanggal 6–8 Juni 1995.

2002 FID melebur (*dissolved*). Sebagian kegiatan melebur dalam International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA).

Daftar Pustaka

Sudarsono, Blasius (2016). *MENUJU ERA BARU DOKUMENTASI*.
Jakarta: LIPI Press

Hardian, Tri (2017). *PERPUSTAKAAN DIGITALI: SEBUAH SEJARAH SINGKAT*
Dikunjungi pada <https://trihardian.web.ugm.ac.id/tag/paul-otlet>

Sudarsono, Blasius (2019). *LEBIH LANJUT TENTANG INTEGRASI DOKUMENTASI*. Dikunjungi pada:
<https://www.kappasigmakappa.id/2019/03/integrasi-dokumentasi.html>